

## **BAB II**

### **MASALAH MIGRASI SERTA DINAMIKA KONFLIK DOMESTIK DAN KRISIS KEMANUSIAAN YANG TERJADI DI UKRAINA**

Transformasi geopolitik yang signifikan berdampak pada setiap aspek kehidupan masyarakat Ukraina, termasuk migrasi. Intensitas, sifat, dan arah migrasi penduduk Ukraina berubah secara dramatis setelah runtuhnya Uni Soviet, tepatnya ketika negara itu membuka diri terhadap dunia dan warganya dapat sepenuhnya menggunakan hak kebebasan bergerak. Penandatanganan Perjanjian Asosiasi dan jalan menuju rezim bebas visa antara Ukraina dan Uni Eropa menyebabkan serangkaian reformasi penting di bidang manajemen migrasi. Namun, aneksasi Krimea dan konflik di Donbas memicu perpindahan besar-besaran, semakin memperburuk krisis ekonomi, serta meningkatkan arus migrasi tenaga kerja.<sup>1</sup>

Konflik di Ukraina Timur telah dimulai sejak April 2014, dengan diperkirakan sebanyak 9.700 orang terbunuh dan 22.600 orang terluka. Selain itu, lebih dari 3,8 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Banyak penduduk yang terjebak di desa sepanjang jalur kontak tanpa pasokan gas, air panas, makanan, atau kebutuhan pokok lainnya. Dalam kondisi yang terus berjuang untuk bertahan hidup dalam keputusasaan, sebanyak 1.641.895 warga Ukraina telah mengungsi ke berbagai wilayah di dalam negeri.

Pembatasan kebebasan bergerak yang mulai diberlakukan oleh kepemimpinan Pemerintah Sementara sejak 21 Januari 2015 berdampak pada

---

<sup>1</sup> IOM Mission in Ukraine, Migration in Ukraine: Facts and Figures, tahun 2016, halaman 5.

pembatasan pergerakan orang, kendaraan, dan barang di sepanjang garis konflik di wilayah Donetsk dan Luhansk. Hal ini juga memisahkan orang-orang yang tinggal di kedua sisi garis kontak dan menghambat pengiriman bantuan kemanusiaan.<sup>2</sup>

**Gambar 2.1.** Peta Batas wilayah GCA dan NGCA



Sumber: <https://www.zerohedge.com/news/2016-08-10/russia-pulls-out-ukraine-peace-talks-citing-crimea-attack-videos-detainee-weapons-ca>

Terlepas dari permusuhan dan pertempuran yang sedang berlangsung, warga sipil telah menunjukkan adanya peningkatan keinginan untuk bepergian

<sup>2</sup> IOM Ukraina 2017: Crisis Respon Plan, Januari-Desember 2017, op.cit., halaman 1.

secara pulang-pergi dengan melintasi garis kontak, yang salah satu tujuannya adalah untuk memeriksa harta benda mereka dan mengunjungi kerabat di daerah-daerah yang dikendalikan oleh pihak non-pemerintah. Namun, banyak juga dari warga Ukraina yang bepergian secara teratur ke wilayah yang dikontrol oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengumpulkan bantuan sosial, menarik uang tunai, mencari perawatan medis, serta membeli makanan dan obat-obatan. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki kondisi di titik persimpangan antara Government Controlled Area (GCA) dan Non-Government Controlled Area (NGCA).<sup>3</sup>

## **A. Masalah Migrasi di Ukraina**

### **1. Perdagangan Manusia**

Ukraina adalah sebuah negara pecahan Uni Soviet yang terletak di wilayah Eropa Timur yang menjadi negara yang independen sejak tahun 1991 setelah kehancuran Uni Soviet. Dibukanya perbatasan dan pasar merubah ekonomi dan migrasi yang terjadi di Ukraina. Adanya budaya migrasi antara Ukraina dan Russia juga muncul akibat adanya perubahan geopolitik yang signifikan. Akibat dari adanya migrasi tenaga kerja warga negara Ukraina adalah adanya peningkatan aktifitas dari kejahatan perdagangan manusia. Pada tahun 1990-an dan awal 2000-an, Ukraina merupakan negara asal dan sampai batas tertentu adalah negara transit bagi orang-orang yang menyatakan diri mereka dalam situasi perbudakan. Dimana dalam beberapa tahun terakhir, Ukraina

---

<sup>3</sup> IOM Ukraina 2017: Crisis Respon Plan, Januari-Desember 2017, loc.cit.

menjadi negara tujuan bagi korban perdagangan manusia, dan kasus perdagangan manusia di dalam negara Ukraina juga semakin meluas.

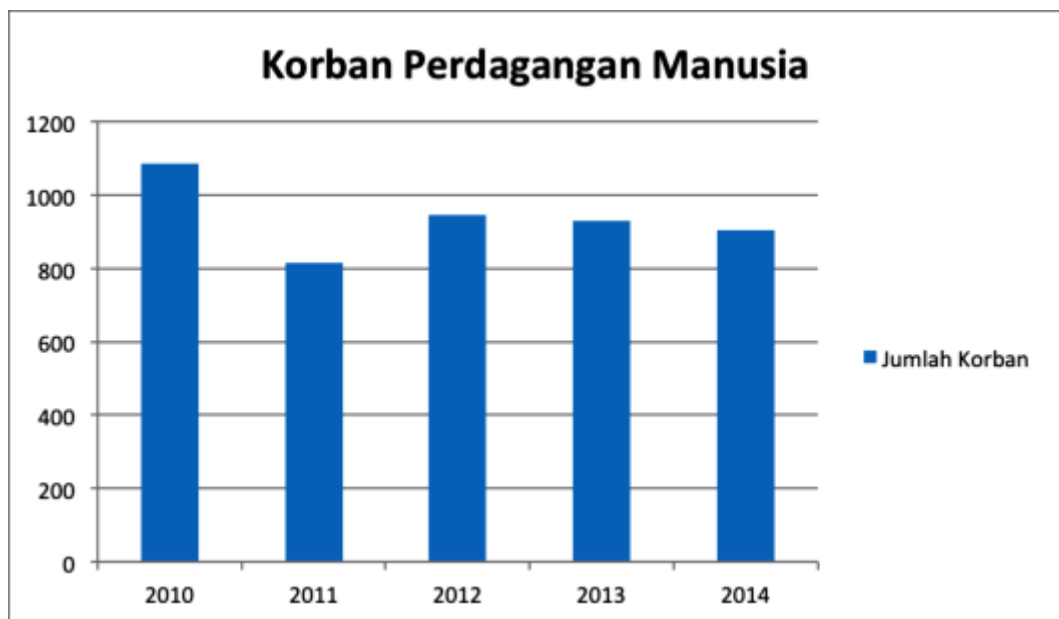
Dibukanya daerah perbatasan di wilayah Ukraina menciptakan peluang bagi masyarakat Ukraina untuk memperbaiki kualitas hidup mereka melalui migrasi tenaga kerja. Ukraina memiliki posisi geopolitik yang strategis. Dimana tidak adanya batas yang diatur dengan negara-negara yang baru merdeka dari Uni Soviet. Adanya peningkatan keamanan dalam bermigrasi di dalam Uni Eropa (UE) telah merubah Ukraina menjadi negara transit bagi para migran ilegal dari Asia maupun Afrika dalam mencari pintu masuk ke Eropa Barat.

Di Ukraina, korban-korban yang diperdagangkan tidak hanya di dalam Ukraina tetapi juga di luar Ukraina seperti Rusia, Polandia, Irak, Spanyol, Turki, Siprus, Yunani, Seychelles, Portugal, Republik Ceko, Israel, Italia, Korea Selatan, Moldova, Cina, Uni Emirat Arab, Montenegro, Inggris, Kazakhstan, Tunisia, dan negara-negara lainnya.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat, pada tahun 2014 Ukraina menempati posisi *Tier 2 Watch List* dalam kejahatan terhadap perdagangan manusia, dimana *Tier 2 Watch List* ini memiliki arti bahwa pemerintah Ukraina tidak sepenuhnya mematuhi standar minimum dalam menghilangkan perdagangan manusia di Ukraina, tetapi ada upaya yang signifikan untuk mematuhi standar minimum tersebut. Sejak tahun 2010, Ukraina stabil

menduduki posisi *Tier 2 Watch List*. Padahal sejak tahun 2004 hingga 2009, Ukraina memiliki posisi yang fluktuatif.<sup>4</sup>

**Bagan 2.1.** Korban Perdagangan Manusia di Ukraina yang teridentifikasi



Sumber: IOM VOT Statistic Ukraine Januari 2015

Pada grafik di atas dijelaskan mengenai jumlah korban perdagangan manusia yang telah teridentifikasi di Ukraina pada tahun 2010 hingga 2014, dimana korban dari perdagangan manusia tersebut menurun dari tahun 2010 dan juga jumlah korban yang telah teridentifikasi masih cukup banyak. Pada tahun 2010, korban perdagangan manusia berjumlah 1085 jiwa, tahun 2011 menjadi 814 jiwa, pada tahun 2012 berjumlah 945 jiwa, pada tahun 2013 berjumlah 929 jiwa dan pada tahun 2014 berjumlah 903 jiwa. Korban-korban tersebut adalah korban

---

<sup>4</sup> Sukmastuti Putri I.G., "Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Menangani Human Trafficking di Ukraina pada Tahun 2010-2014", *Journal of International Relations*, Volume 2 Nomor 2, Tahun 2016, halaman 83.

yang telah teridentifikasi oleh pihak pemerintah Ukraina maupun pihak organisasi internasional yang membantu dalam menangani kejahatan terhadap perdagangan manusia di Ukraina.<sup>5</sup>

## **2. Migrasi Internal**

Setelah Ukraina memproklamlirkan kemerdekaannya pada tahun 1991, volume migrasi internal berkurang secara signifikan karena hilangnya perpindahan yang terorganisir dan rekrutmen tenaga kerja paksa di masa kekuasaan Uni Soviet, adanya komersialisasi pendidikan, peningkatan harga perumahan, dan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan sebelum pecahnya Uni Soviet, 3 juta orang melakukan migrasi internal. Namun jumlahnya saat ini telah menurun di bawah satu juta orang. Menurut Layanan Statistik Negara, pada tahun 2015, hanya 12 dari setiap seribu orang penduduk Ukraina yang mengubah tempat tinggal mereka. Namun, perpindahan internal yang terdokumentasi masih tetap melampaui migrasi internasional sebesar 10 kali lipat.

Perpindahan antar wilayah dan kota mendominasi migrasi internal. Populasi di daerah pedesaan menurun karena arus keluar anak-anak muda ke kota. Kota Kyiv dan Wilayah Kyiv adalah penerima utama migran antardaerah. Pada tahun 2000-an, populasi di ibu kota tumbuh sebesar 20.000 orang per tahun karena masuknya penduduk dari daerah lain.

Karena krisis saat ini, pertumbuhan migrasi menurun dari 14.400 pada 2014 menjadi sekitar 12.000 pada 2015, tetapi jumlah ini masih tetap yang

---

<sup>5</sup> Ibid, halaman 84.

tertinggi di Ukraina. Namun data ini hanya merujuk pada pemukim yang terdaftar secara resmi dan tidak termasuk dengan pengungsi internal.

Orang-orang juga sebagian besar terlibat dalam migrasi tenaga kerja internal, yang tidak terkait dengan arus balik harian atau mingguan ke tempat-tempat tinggal permanen mereka. Migrasi ini mempertimbangkan kondisi pekerjaan musiman, rotasi pekerjaan, dan bahkan pekerjaan yang lebih lama di ibu kota dan pusat-pusat industri terbesar.

Menurut data terbaru yang diperoleh selama penelitian yang dilakukan oleh IOM pada 2014-2015, jumlah pekerja migran internal di Ukraina melebihi 1,6 juta orang dan mencapai 9% dari populasi yang aktif secara ekonomi, serta migrasi tenaga kerja internal yang mungkin akan meningkat sekitar 50%.

Menurut penelitian sosiologis lainnya, bagi 55% pekerja migran internal, pekerjaan mereka merupakan pekerjaan tetap, dan sebagian besar itu merupakan pekerjaan mereka yang hanya satu-satunya. Namun hanya 20% dari pekerja migran internal yang disurvei ini dipekerjakan secara resmi karena yang lainnya bekerja sebagai bagian dari pekerjaan dengan perjanjian yang dilakukan dari mulut ke mulut, atau menganggap diri mereka sebagai wiraswasta.<sup>6</sup>

### **3. Mobilitas Internasional**

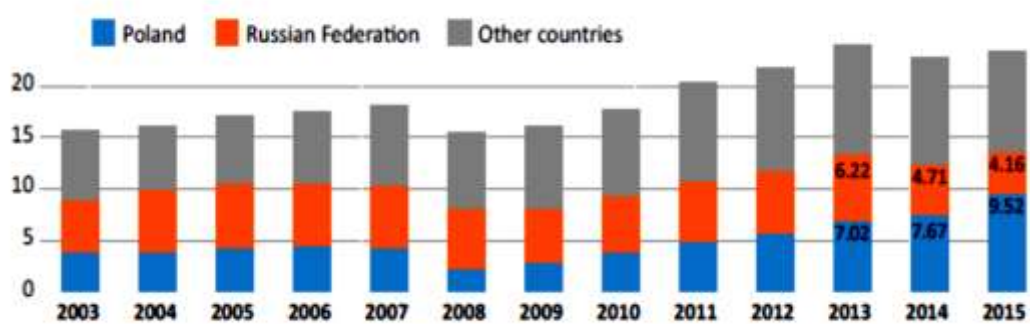
Setelah Ukraina memperoleh kemerdekaan, mobilitas lintas batas populasi Ukraina tumbuh cepat terutama karena penyeberangan perbatasan barat. Pada 2013, yaitu sebelum aneksasi Krimea dan konflik di Ukraina timur, jumlah

---

<sup>6</sup> Migration in Ukraine: Facts and Figures, tahun 2016, op.cit., halaman 7-8.

perjalanan Ukraina ke Polandia untuk pertama kalinya melebihi jumlah perjalanan ke Rusia.

**Bagan 2.2.** Jumlah penyeberangan perbatasan negara oleh warga Ukraina yang keluar dari Ukraina pada 2003-2015 (dalam jutaan kali)



Sumber: State Border Guard Service of Ukraine

Sejak awal konflik Ukraina, telah terjadi penurunan umum dalam jumlah perjalanan ke luar negeri, terutama dalam jumlah perjalanan ke Rusia. Pada tahun 2014, orang Ukraina yang bepergian ke luar negeri hampir 30% lebih sedikit dari tahun 2013. Pada saat yang sama, jumlah perjalanan ke UE terus mengalami pertumbuhan, yang meningkat dari 10,5 juta pada 2014 menjadi 12,5 juta pada 2015.<sup>7</sup>

Intensifikasi mobilitas lintas-perbatasan Ukraina ke UE difasilitasi oleh perjanjian lalu lintas perbatasan kecil, yang ditandatangani bersama dengan Hongaria pada tahun 2007, dengan Polandia dan Slovakia pada 2008, serta dengan Rumania pada 2014. Di bawah perjanjian ini, warga yang berada di zona

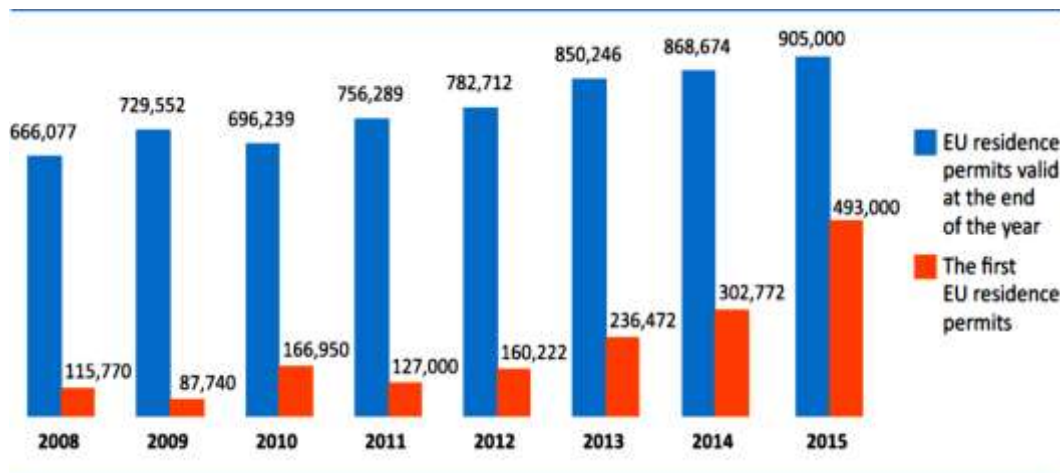
<sup>7</sup> IOM Mission in Ukraine, Migration in Ukraine: Facts and Figures, tahun 2016, op.cit., halaman 10.



perbatasan dapat melakukan perjalanan ke negara-negara tetangga tanpa visa, dan bisa memasuki wilayah teritorial dengan jarak dari 30 km untuk Polandia, hingga 50 km untuk dua negara lainnya. Menurut sebuah survei terhadap penumpang internasional, penduduk yang tinggal di 30 kilometer di sekitar zona perbatasan melakukan hingga 65% dari penyeberangan perbatasan ke Polandia.

Jumlah orang Ukraina yang tinggal di UE terus bertambah. Pada 2015, ada sebanyak 905.200 orang yang tinggal dan lebih dari 6% dari mereka merupakan orang asing dari ketiga negara di Uni Eropa tersebut. Mayoritas warga Ukraina tinggal di Italia (238.000), Polandia (336.000), Jerman (112.000), Republik Ceko (113.000), dan Spanyol (84.000).

**Bagan 2.3.** Jumlah izin tinggal di UE yang pertama dan izin tinggal di UE yang berlaku pada akhir tahun untuk warga negara Ukraina (2008-2015)



Sumber: Eurostat: Asylum and Managed Migration

Pada 2015, 493.000 warga Ukraina memperoleh izin tinggal di Uni Eropa yang 50% lebih banyak dari tahun 2014. Mayoritas izin ini (87%)

dikeluarkan di Polandia. Hampir semuanya bersifat jangka pendek (3-12 bulan) dan dikeluarkan untuk kinerja pekerjaan musiman. Pekerjaan adalah tujuan utama kedatangan warga negara Ukraina ke UE. 76% izin tinggal dikeluarkan untuk warga Ukraina sehubungan dengan adanya pekerjaan berbayar, sementara semua warga negara ketiga hanya memperoleh sekitar sepertiga dari izin tersebut.<sup>8</sup>

#### **4. Migrasi Tenaga Kerja**

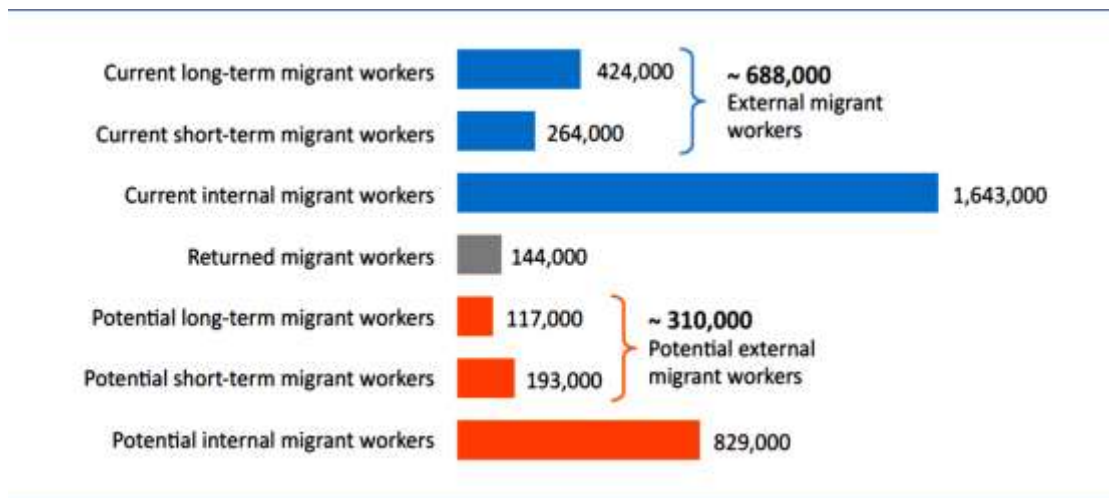
Peluang pertama Ukraina untuk menikmati hak atas kebebasan bergerak bertepatan dengan transformasi struktural yang dalam pada ekonomi, serta disertai dengan turunnya standar hidup dan meningkatnya pengangguran. Karena degradasi sistem layanan kesehatan dan pendidikan gratis, penduduk harus menanggung sendiri biaya untuk dua hal ini. Dengan tidak adanya sistem kredit yang dikembangkan, mereka yang mau memulai bisnis pun membutuhkan modal awal untuk kegiatan usaha mereka. Transisi ke ekonomi pasar menciptakan permintaan konsumen baru untuk produk-produk berbiaya tinggi seperti perumahan, mobil, dan peralatan rumah tangga. Hal ini memancing munculnya migrasi tenaga kerja, yang pada akhir 1990-an menjadi fenomena massal dan sumber pendapatan bagi banyak keluarga. Menurut penelitian yang dilakukan di bawah proyek IOM pada 2014-2015, sekitar 700.000 warga Ukraina bekerja di luar negeri.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> IOM Mission in Ukraine, *Migration in Ukraine: Facts and Figures*, tahun 2016, op.cit., halaman 11-12.

<sup>9</sup> *Ibid*, halaman 12.

**Bagan 2.4.** Perkiraan jumlah tenaga kerja migran dari Ukraina pada 2014-2015



Sumber: IOM survey of households and migrant workers

Karena konflik militer dan krisis ekonomi yang mendalam, sentimen pro-emigrasi berkembang di kalangan penduduk Ukraina. Upaya untuk memecahkan masalah dengan mencari pekerjaan di luar negeri difasilitasi oleh pengalaman migrasi tenaga kerja Ukraina, dan jaringan migrasi yang kuat yang muncul dalam beberapa dekade terakhir. Sebuah survei yang dilakukan oleh IOM pada musim semi 2015 menunjukkan bahwa 8% dari warga Ukraina berencana untuk mencari pekerjaan di luar negeri dalam waktu dekat atau sudah menemukannya. Menurut survei serupa di tahun 2011, jumlah mereka adalah sebesar 6%.

Peningkatan migrasi tenaga kerja disertai dengan reorientasi aliran yang baru muncul dari timur (ke Rusia) ke barat (ke UE). Menurut survei yang sama, pangsa calon pekerja migran dari Ukraina yang mencari pekerjaan di Rusia menurun dari 18% pada 2011 menjadi 12% pada 2015. Pada saat yang sama, daya

tarik untuk mencari kerja ke Polandia meningkat dari 7% pada tahun 2006 (ketika studi serupa pertama kali dilakukan) menjadi 30% pada tahun 2015.

Namun, menurut sebuah studi aliran moneter migran ke Ukraina dan dampaknya terhadap perkembangan negara yang dilakukan oleh IOM pada tahun 2014-2015, mayoritas dari rencana perjalanan jangka pendek pada migran yang potensial dengan tujuan untuk menghasilkan uang berniat untuk pergi ke Rusia. Sedangkan bagi calon migran jangka panjang, mereka berencana untuk tinggal di luar negeri selama lebih dari setahun, dengan Rusia sebagai negara tujuan yang kedua setelah Polandia.

Menurut penelitian yang sama, ada perubahan dalam struktur migrasi tenaga kerja dari Ukraina, yaitu volume migrasi jangka panjang yang meliputi pemuda, wanita, penduduk kota, orang-orang dari Ukraina Utara, tengah dan timur, yang semakin meningkat keterlibatannya dalam migrasi.<sup>10</sup>

## **5. Pencari Suaka**

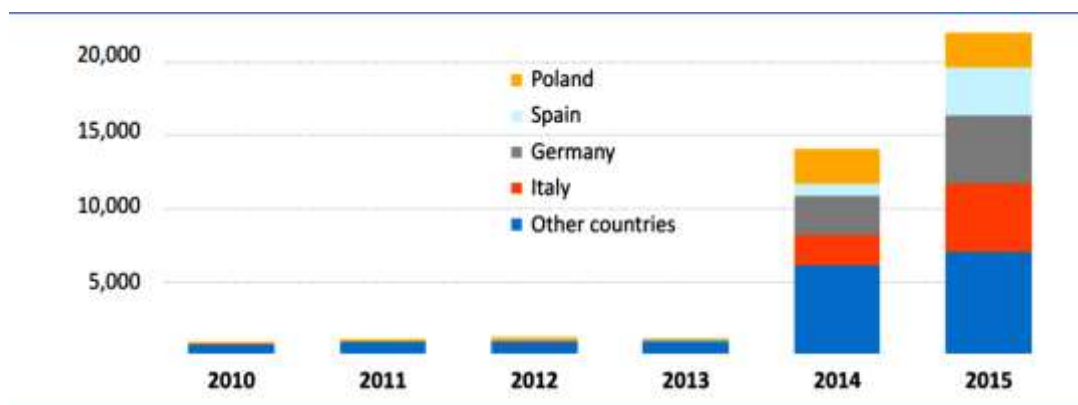
Aneksasi Krimea dan aksi militer di Donbas pada 2014-2015, mendorong tidak hanya migrasi paksa internal, tetapi juga migrasi paksa eksternal. Jumlah aplikasi suaka yang diajukan oleh warga Ukraina di negara-negara Uni Eropa pada tahun 2015 melampaui 22.000, lebih dari 33% lebih dari pada tahun 2014, dan lebih dari 20 kali lebih banyak dari pada tahun 2013. Sebagian besar aplikasi diajukan di Italia, Jerman, Spanyol, dan Polandia. Namun, jumlah aplikasi yang diajukan oleh Ukraina hanya 1,7% dari semua aplikasi suaka yang diajukan di UE. Selain itu, hanya beberapa orang Ukraina yang menerima

---

<sup>10</sup> Ibid, halaman 14-15.

tanggapan positif terhadap banding mereka. Pada 2015, 415 warga Ukraina menerima status pengungsi di UE, dan bentuk suaka tambahan untuk pertimbangan kemanusiaan diberikan kepada 1.150 orang.

**Bagan 2.5.** Jumlah permohonan suaka yang diajukan oleh warga Ukraina di UE, pada 2010-2015



Sumber: Eurostat: Asylum and Managed Migration

Banyak migran paksa dari zona konflik berangkat ke Rusia antara lain dikarenakan kedekatan geografis, ikatan keluarga, serta kedekatan sosial budaya maupun politik. Menurut Migrasi Federal Layanan Federasi Rusia, pada tahun 2015, 2,5 juta warga Ukraina terdaftar di Rusia. Jumlah ini hampir satu juta lebih banyak dari pada yang terdaftar pada 1 Januari 2014. Pada akhir 2015, 273 warga Ukraina diberi status pengungsi di Rusia dan 311.000 orang diberikan suaka sementara.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Ibid, halaman 16.

## **B. Sejarah Konflik Domestik di Ukraina**

Krisis politik di Ukraina berawal ketika Presiden Ukraina Viktor Yanukovych memutuskan untuk tidak menandatangani Perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi (PSA) dengan UE di Vilnius, Lithuania, pada 28-29 November 2013. Pemerintah lebih menerima dana talangan dari Rusia dalam bentuk pembelian obligasi pemerintah Ukraina senilai \$15 milyar serta diskon gas dari Rusia sebesar \$280 per 1.000 m<sup>3</sup>.

Keputusan tersebut menghasilkan demonstrasi pro-integrasi dengan Eropa di alun-alun (Maidan) Kyiv dan diadakannya pemungutan suara di parlemen Ukraina (Verkhovna Rada) untuk mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah. Demonstrasi yang awalnya berlangsung damai dan menuntut agar Ukraina bergabung dengan UE kemudian menjadi anarkis dan berubah isu menjadi pergantian rezim. Hal itu dipicu oleh diterbitkannya UU Anti Protes dan munculnya kaum radikal Spilna Sprava (Sektor Kanan) yang beraliran fasis dan Partai Svoboda (beraliran neo-Nazi) dalam demonstrasi massa. Bentrokan pecah pada 19 dan 22 Januari 2014 yang mengakibatkan 80 orang tewas dan sekitar 700 orang lainnya luka-luka. Selain itu, 108 polisi ditembak, beberapa meninggal, dan 63 dalam keadaan kritis.<sup>12</sup>

Pada 25 Januari 2014, pemerintah menawarkan jabatan strategis di dalam kabinet kepada kubu oposisi untuk menerapkan perubahan UUD yang akan mengurangi kekuasaan presiden. Proposal ini ditolak oleh para pemimpin oposisi yang kemudian terus melanjutkan demonstrasi hingga agenda yang diklaim

---

<sup>12</sup> Frassminggi Kamasa, "Krisis Ukraina dan Dampaknya terhadap Tatanan Politik Global dan Regional", *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 11 Nomor 1, Juni 2014, halaman 86.

sebagai tuntutan rakyat Ukraina terpenuhi, antara lain Ukraina bergabung dengan UE, memajukan jadwal pilpres, dan pergantian pimpinan nasional (parlemen, presiden, Perdana Menteri, dan Kabinet Menteri). Keadaan berkembang dengan cepat ketika berbagai konsesi yang ditawarkan pemerintah dalam bentuk pembatalan UU Anti Protes, pengunduran diri Perdana Menteri, dan pengesahan UU pemberian amnesti bagi demonstran yang ditahan, tidak kunjung membuat kekacauan menjadi mereda. Bahkan sebaliknya, bentrokan kembali pecah pada 18-19 Februari 2014 yang mengakibatkan 82 orang tewas dan ratusan orang luka-luka.

Untuk mencegah keadaan menjadi semakin memburuk, para pihak yang bertikai kemudian sepakat untuk duduk bersama guna mengakhiri krisis politik berdarah yang terjadi sejak November 2013. Pada 21 Februari 2014, kesepakatan damai tercapai antara pemerintah dengan oposisi. Namun, kesepakatan ini berumur pendek karena kekerasan kembali pecah ketika kelompok Spilna Sprava dan Partai Svoboda mengambil alih gedung parlemen Ukraina dan berhadapan dengan Berkut. Dengan gagalnya kesepakatan 21 Februari tersebut, maka proses transisi politik di Ukraina secara damai mengalami jalan buntu.

Keadaan berubah sedemikian cepat ketika parlemen di akhir pekan (22-23 Februari 2014) melakukan sidang istimewa secara maraton untuk membentuk pemerintahan masa transisi termasuk memakzulkan pemerintah yang sedang berkuasa, menunjuk Oleksandr Turchynov sebagai Presiden sementara, dan menetapkan pilpres pada 25 Mei 2014 (dari jadwal seharusnya pada 29 Maret 2015). Empat hari kemudian, parlemen menyetujui pilihan Presiden Turchynov

dan Arseniy Yatsenyuk sebagai Perdana Menteri sementara, kemudian juga menyetujui pembentukan kabinet yang menyingkirkan elemen pro-Yanukovych, serta menggantinya dengan elemen pro-Barat, radikal, dan ultra-nasionalis.<sup>13</sup>

Pemerintahan baru yang bersifat sementara itu mendapat pengakuan dari PBB dan Uni Eropa. Namun, Rusia memandang pemerintahan Yatsenyuk sebagai pemerintahan ilegal dan merupakan bentuk kudeta. Rusia bahkan menuduh Amerika Serikat dan Uni Eropa mendanai dan mengarahkan “Revolusi Ukraina” dan memandang bahwa Yanukovych diberhentikan secara ilegal. Oleh karena itu, Rusia tetap menganggap Yanukovych sebagai presiden Ukraina.<sup>14</sup>

Pelanggaran terhadap HAM dalam Konflik Ukraina semakin meningkat. Pada akhir Februari 2014, konflik memang sempat mereda yang diikuti dengan meredanya pelanggaran terhadap HAM. Namun pelanggaran terhadap HAM kembali terjadi ketika pemerintahan yang baru tidak mewakili kepentingan dari penduduk dengan etnis Rusia yang berada di daerah timur Ukraina. Daerah Donetsk dan Luhansk merupakan daerah yang menjadi basis pertempuran antara tentara Ukraina dan kelompok separatis.<sup>15</sup>

Tidak lama setelah lengsernya Yanukovych pada akhir Februari 2014, Presiden Rusia Putin memerintahkan invasi ke Semenanjung Krimea di Ukraina dan mengklaim tindakannya tersebut untuk melindungi etnis Rusia yang tinggal di

---

<sup>13</sup> Ibid, halaman 88

<sup>14</sup> Indriana Kartini, “Aneksasi Rusia di Krimea dan Konsekuensi bagi Ukraina”, Jurnal Penelitian Politik, Volume 11 Nomor 2, Desember 2014, halaman 28.

<sup>15</sup> Veronika Suci Novitasari Buntaran, “Bantuan Luar Negeri Sebagai Instrumen Diplomasi: Studi Kasus Bantuan Kemanusiaan Rusia Kepada Donbas dalam Konflik Rusia-Ukraina 2014-2015”, Journal of International Relations, Volume 4, Nomor 3, 2018, halaman 421.



sana.<sup>16</sup> Dua minggu kemudian, tepatnya pada 16 Maret 2014, Parlemen Krimea memutuskan untuk melakukan referendum. Mosi yang diajukan oleh pemerintah kepada masyarakat adalah bersedia atau tidak masyarakat Krimea untuk bergabung dengan Rusia atau tetap menjadi bagian dari kedaulatan Ukraina. Sekitar 1,5 juta masyarakat Krimea melakukan referendum dan memberikan suaranya di 27 tempat pemungutan suara yang telah disediakan oleh komisi pemilihan umum Krimea mulai pukul 08.00 sampai 20.00 waktu setempat. Hasil resmi menunjukkan sebanyak 96,6% masyarakat Krimea memilih untuk bergabung dengan Rusia dan sebanyak 3,4% memilih untuk tetap dengan Ukraina.

Hasil dari referendum ini tidak serta merta dapat dijadikan pembenaran keberadaan militer Rusia di Krimea. Menurut pandangan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat (AS), pengiriman pasukan militer Rusia ke Krimea tersebut adalah tindakan aneksasi. Karena di dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 tahun 1970, negara-negara dilarang menggunakan ancaman serta kekerasan dengan menggunakan militer.<sup>17</sup>

Implikasi dari perkembangan situasi di Krimea mengakibatkan timbulnya pergerakan massa pro-Rusia yang semakin intensif khususnya di berbagai kota di wilayah timur Ukraina seperti Kharkiv, Donetsk, Luhansk, Sloviansk, Odessa, Zaporizhzhia, dan Mykolayiv. Sebagian diantaranya menuntut diadakannya referendum untuk penerapan negara federal Ukraina atau menggabungkan diri dengan Rusia.

---

<sup>16</sup> Central Intelligence Agency, [https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print\\_up.html](https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print_up.html), (diakses pada 21 Desember 2018 pukul 22.45 WIB).

<sup>17</sup> Irvand Sahir, "Aneksasi Rusia terhadap Krimea Tahun 2014", eJournal Ilmu Hubung Internasional, Volume 7 Nomor 1, tahun 2018, halaman 44.

Pada 11 Mei 2014, separatis pro-Rusia di bagian timur Ukraina mengadakan referendum kemerdekaan meski pemerintah Ukraina di Kyiv tidak mengakui referendum tersebut. Para pemilih di kawasan Donetsk dan Luhansk, yang penduduknya sekitar 15% dari populasi Ukraina, memberikan suara dengan hasil sekitar 90% warga di kedua wilayah tersebut memilih untuk melepaskan diri dari Ukraina. Kyiv membalas aksi separatisme tersebut dengan melancarkan operasi anti-teroris skala besar untuk menghadapi separatis pro-Rusia bersenjata yang kemudian menimbulkan korban di kedua belah pihak.<sup>18</sup>

Di tengah krisis politik domestik yang belum menemukan penyelesaian, referendum ini memperumit kondisi krisis di Ukraina, apalagi Barat menganggap referendum ini ilegal. Referendum ini kemudian mempertajam perseteruan antara Barat dengan Rusia.<sup>19</sup> Referendum dianggap tidak sah oleh Pemerintah Ukraina, Uni Eropa, AS, dan Majelis Umum PBB. Sebagai tanggapan terhadap aneksasi yang diakui Rusia atas Krimea, 100 anggota PBB meloloskan resolusi Majelis Umum PBB 68/262 yang menolak referendum karena dianggap sebagai tindakan yang tidak berdasar dan tidak sah, serta menegaskan kedaulatan, kemerdekaan politik, persatuan, dan integritas teritorial Ukraina.

Rusia terus memasok proksi di dua provinsi timur Ukraina dengan tenaga kerja, pendanaan, dan material yang mengakibatkan konflik bersenjata dengan Pemerintah Ukraina. Menindaklanjuti hal ini, perwakilan dari Ukraina, Rusia, dan republik proksi Rusia yang tidak dikenali menandatangani Protokol Minsk (kesepakatan gencatan senjata) dan Memorandum pada September 2014 di Minsk,

---

<sup>18</sup> Frassminggi Kamasa, *op.cit.*, halaman 94.

<sup>19</sup> Frassminggi Kamasa, *op.cit.*, halaman 92.

Belarus, yang bertujuan untuk mengakhiri konflik.<sup>20</sup> Pertemuan ini difasilitasi oleh Pemerintah Belarus dan dihadiri oleh perwakilan dari Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE).<sup>21</sup> Namun, perjanjian ini gagal menghentikan pertempuran. Dalam upaya baru untuk meredakan bentrokan yang sedang berlangsung, para pemimpin Ukraina, Rusia, Perancis, dan Jerman menegosiasikan rencana tindak lanjut pada Februari 2015 untuk menerapkan Perjanjian Minsk. Perwakilan dari Ukraina, Rusia, dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa juga bertemu secara rutin untuk memfasilitasi pelaksanaan kesepakatan damai ini. Lebih dari 34.000 warga sipil telah terbunuh atau terluka dalam pertempuran akibat agresi Rusia di Ukraina timur.<sup>22</sup>

Pada 16 September 2014, Parlemen Ukraina menetapkan undang-undang otonomi luas untuk kawasan Donetsk dan Luhansk. Undang-undang baru ini adalah bagian dari kompromi dengan kelompok separatis pro-Rusia. Selain itu, kawasan timur diberikan hak untuk menyelenggarakan pemilu regional sendiri dan mendirikan pasukan keamanan di daerah-daerah otonomi. Para anggota separatis yang selama ini berperang melawan pasukan pemerintah akan mendapat amnesti, kecuali mereka yang terlibat dalam kejahatan besar. Adapun timbal balik dari UU tersebut, separatis pro-Rusia harus mencabut tuntutan untuk merdeka dari Ukraina. Meski terdapat gencatan senjata dan pembaharuan gencatan senjata secara penuh pada 20 September 2014, kontak senjata masih terjadi dan menimbulkan korban sipil.

---

<sup>20</sup> op.cit., [https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print\\_up.html](https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print_up.html).

<sup>21</sup> Frassminggi Kamasa, op.cit., halaman 94.

<sup>22</sup> op.cit., [https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print\\_up.html](https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print_up.html).

Menurut PBB, hingga September 2014, korban tewas dalam konflik Ukraina timur mencapai 3.543 jiwa, termasuk 298 korban pada kecelakaan pesawat Malaysia Airlines. Badan Urusan Pengungsi PBB (UNHCR) menyatakan pada 27 Juni 2014, sekitar 110.000 orang telah melarikan diri dari Ukraina ke Rusia dan sekitar 54.400 warga Ukraina lainnya terpaksa mengungsi di dalam negeri Ukraina. Sementara data per September 2014 menyatakan bahwa jumlah pengungsi sudah mencapai lebih dari 275.000 orang.<sup>23</sup>

Ukraina tidak menerima referendum yang digelar di Krimea. Pemerintah Kyiv meminta agar semua negara, lembaga-lembaga internasional, dan badan-badan khusus untuk tidak mengakui pergantian status Krimea berdasarkan referendum. Pada tanggal 16 Maret 2014, Parlemen Ukraina menyatakan bahwa pelaksanaan referendum di Krimea pada 16 Maret 2014 adalah tidak sah karena bertentangan dengan UUD Ukraina.<sup>24</sup>

### **C. Krisis Kemanusiaan yang Dialami oleh Penduduk Ukraina Akibat Konflik Domestik**

Konflik di Ukraina Timur telah dimulai sejak April 2014, dengan diperkirakan sebanyak 9.700 orang terbunuh dan 22.600 orang terluka. Selain itu, lebih dari 3,8 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Banyak penduduk yang terjebak di desa sepanjang jalur kontak tanpa pasokan gas, air panas, makanan, atau kebutuhan pokok lainnya. Dalam kondisi yang terus berjuang untuk bertahan hidup dalam keputusasaan, sebanyak 1.641.895 warga Ukraina

---

<sup>23</sup> Frassminggi Kamasa, op.cit., halaman 95.

<sup>24</sup> Ibid halaman 96-97

telah mengungsi ke berbagai wilayah di dalam negeri,<sup>25</sup> termasuk sekitar 300.000 orang yang terlantar yang membutuhkan bantuan kemanusiaan di dalam wilayah yang dikendalikan pemerintah Ukraina (GCA).<sup>26</sup>

Sebuah kesepakatan gencatan senjata yang bersifat lemah, secara berkala dilanggar dengan adanya insiden penembakan dan meningkatnya konflik lokal yang terjadi di beberapa wilayah, kemudian menghasilkan kerentanan populasi yang berkelanjutan. Terutama bagi mereka yang tinggal di dekat kedua sisi garis kontak yang disebut zona penyangga, yaitu suatu wilayah tak bertuan di antara dua garis konflik.

Di area yang dikendalikan pemerintah (GCA) dari Ukraina Timur, situasi ekonomi yang sulit secara keseluruhan dirasakan oleh para pengungsi internal (IDPs), pengungsi yang baru kembali ke wilayahnya, dan masyarakat yang terkena dampak konflik dengan kemungkinan adanya keterbatasan mata pencaharian dan sebagian besar tidak memiliki simpanan tabungan. Hal ini kemudian menempatkan mereka pada posisi yang berbahaya akibat ditutupnya akses untuk mendapatkan kebutuhan dasar mereka. Layanan dasar dan berbagai jenis barang tidak bisa mencapai desa-desa dan kota-kota paling terpencil karena berbagai alasan, termasuk kondisi jalan yang sangat buruk, juga seperti keberadaan ranjau, senjata-senjata, dan bahan peledak lainnya dari sisa-sisa konflik yang sedang berlangsung.

---

<sup>25</sup> IOM Ukraina 2017: Crisis Respon Plan, Januari-Desember 2017, op.cit., halaman 1.

<sup>26</sup> IOM International, "Ukraine 2017: Humanitarian Compendium", <https://humanitariancompendium.iom.int/node/109/appeals-print/>, (diakses pada 21 Desember 2018 pukul 22.35 WIB).

Sebagian besar lansia, orang cacat, dan orang yang terkena dampak oleh penyakit kronis tidak pernah bisa meninggalkan rumah mereka, walaupun posisi mereka terletak di dekat jalur kontak atau di zona penyangga. Setelah tiga tahun, banyak orang yang tidak mampu lagi hidup di area pegungsian dikembalikan ke daerah asalnya. Banyak dari mereka, yang hanya bisa terbaring di tempat tidur, diserahkan kembali kepada beberapa kerabatnya yang masih tetap tinggal di daerah asalnya, atau ke panti jompo dan pusat rehabilitasi yang minim dana dan terabaikan. Ada juga orang yang tidak terdaftar sebagai pengungsi tetapi meninggalkan rumah mereka yang hancur akibat serangan tembakan dan kemudian tinggal di daerah sekitarnya, di rumah saudara, atau kerabatnya.

Akibat terbatasnya persediaan dan adanya peningkatan biaya, hal penunjang kebersihan, dan kebutuhan musim dingin adalah yang paling dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat yang terkena dampak. Masyarakat menganggap dukungan semacam itu penting untuk kesejahteraan dan keamanan mereka karena barang-barang ini akan mencegah timbulnya penyakit terkait kebersihan yang dapat diperparah dengan kurangnya akses terhadap pasokan medis.<sup>27</sup>

Stabilitas Ukraina tetap menjadi tantangan sepanjang tahun 2017. Konflik yang sedang berlangsung di Ukraina timur terus mempengaruhi kehidupan hampir satu juta anak-anak, dengan gejolak periodik dan kekacauan parah terhadap layanan dan infrastruktur.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> IOM Ukraine, on the Edge: Stories of humanitarian Relief in Eastern Ukraine, tahun 2017, halaman 8.

<sup>28</sup> UNICEF, UNICEF Annual Report 2017: Ukraine, Tahun 2017, halaman 1.

Tahun 2017 menjadi tahun dengan jumlah korban manusia yang semakin memburuk dari konflik bersenjata di Ukraina timur yang terus berlanjut. Dengan kekurangan kepatuhan penuh terhadap perjanjian gencatan senjata baru, hampir 14.000 insiden keamanan (rata-rata 38 insiden sehari) didapati di daerah Donets dan Luhanska, yang sebagian besar terkonsentrasi di daerah sepanjang 'garis kontak' sepanjang 457 kilometer.

Konflik permusuhan yang terjadi setiap harinya telah merenggut hampir 600 nyawa masyarakat sipil dan menyebabkan kerusakan rumah-rumah dan infrastruktur umum sehingga kondisinya menjadi kritis. Warga sipil pun banyak yang terperangkap di antara pihak-pihak yang berkonflik yang melakukan pelanggaran dengan terus melakukan penyerangan, adanya risiko dari tempat kerja di sektor pertambangan, adanya konflik senjata dan bentrokan yang terus terjadi, sementara di lain sisi mereka pun kurang mampu untuk mendapatkan akses bantuan. 'Jalur kontak', yang dengan cepat menjadi salah satu dari wilayah yang paling terkontaminasi ranjau di dunia, sudah sejak lama menjadi perbatasan *de facto* yang tidak hanya memutus koneksi sosial ekonomi dan saling ketergantungan antara wilayah yang dikontrol Pemerintah (GCA) dan NGCA, tetapi juga menghambat akses ke layanan esensial dan kebutuhan yang mendasar.

Setiap harinya, satu dari empat warga Ukraina menderita konsekuensi yang merugikan dari konflik berkepanjangan di timur Ukraina. Ketika sumber daya menyusut, jutaan orang, termasuk 1,6 juta orang pengungsi internal (IDPs), setengahnya adalah orang lansia, yang dipaksa untuk membuat pilihan yang mustahil antara makanan, obat-obatan, tempat tinggal, pemanas, atau pendidikan

anak-anak mereka, serta bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup.

Sementara itu, dana kemanusiaan yang dilaporkan ke Ukraina dipangkas setengahnya dari US \$ 246 juta di 2016 menjadi \$ 127 juta di 2017. Pada tahun 2017, Humanitarian Respon Plan (HRP) menghadapi kekurangan dana yang parah, dengan hanya US \$ 71 juta yang diterima (atau 35 persen dari persyaratan \$ 204) – jumlah ini menurun sebesar 32 persen dari \$ 105 juta yang diterima HRP 2016. Aktivis kemanusiaan pun terpaksa menghentikan beberapa operasi kritis, sementara beberapa lainnya bahkan terpaksa menutup aktivitasnya. Keputusan mereka untuk mengakhiri kegiatan berarti berdampak pada terjadinya kesenjangan yang lebih besar bagi warga yang tersisa yang belum mendapatkan bantuan. Pada akhirnya, berdampak pada berkurangnya bantuan kepada orang-orang yang paling rentan yang membutuhkannya.<sup>29</sup>

Menurut data dari Ministry of Social Policy (MoSP) Ukraina, per 18 Desember 2017 tercatat hampir 1,5 juta orang terdaftar sebagai pengungsi, dengan sebagian besar tinggal di Donetsk dan Luhansk. Pengungsi internal (IDPs), pengungsi yang baru kembali ke wilayahnya, dan populasi yang terkena dampak konflik lainnya terus melewati jalur kontak secara terus-menerus, antara area yang dikendalikan non-pemerintah (NGCA) dan area yang dikendalikan pemerintah (GCA) di lima pos pemeriksaan. Sepanjang 2017, angka-angka individu yang melintasi garis kontak mencapai rekor tertinggi pada Agustus 2017, ketika tercatat 1,2 juta orang melewati garis kontak selama sebulan. Banyaknya orang yang

---

<sup>29</sup> Humanitarian Country Team, Humanitarian Respon Plan: End of Year Report, January-Desember 2017, Februari 2018, halaman 6.



menyeberang antara GCA dan NGCA dan kapasitas yang terbatas dari tiap-tiap pos pemeriksaan untuk memproses peningkatan arus pergerakan, telah menyebabkan antrian panjang, kurangnya fasilitas sanitasi yang memadai, dan paparan kondisi cuaca buruk yang berdampak pada keprihatinan kesehatan dan perlindungan lainnya, seperti yang terkait dengan kebutuhan psikososial, perdagangan orang, dan eksploitasi.<sup>30</sup>

Permasalahan lainnya yaitu kondisi kehidupan dan pembayaran untuk sewa dan kebutuhan. Sebagian besar pengungsi membayar akomodasi mereka dan 66 persen tinggal di rumah sewa. Sejumlah pengungsi lainnya (22 persen) tinggal bersama saudara atau keluarga angkatnya. Hanya satu persen yang tinggal di rumah mereka sendiri di daerah yang dikendalikan pemerintah Ukraina.

Meskipun mengalami kesulitan, 26 persen pengungsi menyatakan niat untuk tidak kembali ke tempat asal mereka. 39 persen ingin kembali ketika konflik berakhir. 17 persen lainnya mengatakan bahwa mereka mungkin mempertimbangkan untuk kembali lagi ke wilayah asalnya di masa depan. Kurangnya dukungan dalam menemukan solusi yang relevan untuk para pengungsi dan pengungsi yang baru kembali ke wilayah asalnya menghalangi integrasi mereka dan menciptakan ketergantungan pada bantuan pemerintah dan organisasi yang membantu.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> IOM Ukraina, Crisis Respon Plan IOM Ukraine, 1 Januari-31 Desember 2018, halaman 1-2.

<sup>31</sup> IOM Ukraine, "Three Years into the Conflict: New IOM Survey Confirms Continuous Harsh Living Conditions of IDPs in Ukraine", 12 Mei 2017, <http://www.iom.org.ua/en/three-years-conflict-new-iom-survey-confirms-continuous-harsh-living-conditions-idps-ukraine>, (diakses pada 8 Januari 2019 pukul 02.50 WIB).

Para pengungsi internal menghadapi tantangan ekonomi dan sosial untuk membangun kehidupan mereka di tempat dan komunitas baru. Data baru yang dikumpulkan oleh IOM, Badan Migrasi PBB, dalam kerangka proyek yang didanai Uni Eropa, menunjukkan bahwa situasi ketenagakerjaan bagi pengungsi menurun. Pada bulan Juni 2018, 42% dari IDP yang disurvei telah bekerja, ini mencerminkan penurunan 6% dari bulan Maret di tahun yang sama. Sebanyak 11% pengungsi secara aktif mencari pekerjaan dan siap untuk mulai bekerja. Mereka yang mencari pekerjaan melaporkan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Tantangan-tantangan yang mereka hadapi termasuk upah rendah untuk lowongan yang tersedia, kurangnya lowongan yang sesuai dengan kualifikasi mereka, dan diskriminasi oleh majikan berdasarkan usia mereka atau status IDP.

Pendapatan rata-rata untuk seorang IDP juga terus turun sejak Desember 2017. Pada Juni 2018, pendapatannya turun menjadi kurang dari UAH 2.100, atau sekitar USD 77 per bulan. Jumlah ini lebih kecil dari tingkat pendapatan nasional yang dihitung oleh Kementerian Kebijakan Sosial Ukraina, yang mencapai lebih dari UAH 3.300 pada Juni 2018.<sup>32</sup>

Karena sifat konflik yang berkepanjangan di Ukraina Timur, pertumbuhan ekonomi yang lambat dan meningkatnya ketegangan sosial, tahun 2018 menjadi tahun yang penting untuk transisi dari bantuan kemanusiaan ke upaya pemulihan jangka panjang. Menjembatani kesenjangan antara intervensi kemanusiaan dan pembangunan sangat penting secara simultan untuk mengatasi

---

<sup>32</sup> IOM Ukraina, "IDPS' Average Income is One Third Lower than Ukraine's National Subsistence Level", 15 Agustus 2018, <http://www.iom.org.ua/en/idps-average-income-one-third-lower-ukraines-national-subsistence-level>, (diakses pada 8 Januari 2019 pukul 02.19 WIB).

kebutuhan mendesak dan jangka panjang dari konflik yang mempengaruhi komunitas di Donbas. Situasi arus perpindahan yang berlarut-larut membutuhkan upaya penyelesaian bersama dari Pemerintah Ukraina, para aktivis kemanusiaan dan pembangunan, serta masyarakat yang terkena dampak konflik untuk bersama-sama mengidentifikasi tindakan yang mendukung solusi yang dapat bertahan lama untuk mengakhiri arus perpindahan ini.<sup>33</sup>

Konflik di Ukraina Timur terus memicu akan kebutuhan kemanusiaan, mengganggu tatanan kehidupan, dan mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur publik dan swasta yang parah. Masalah perpindahan yang berkepanjangan tetap menjadi tantangan besar, dan kurangnya peluang mata pencaharian memaksa beberapa pengungsi internal (IDP) untuk kembali sebelum waktunya ke daerah yang masih berstatus tidak aman. Krisis yang sifatnya berkepanjangan berdampak pada semua aspek kehidupan bagi warga sipil yang tinggal di sepanjang garis kontak di Ukraina Timur.<sup>34</sup>

Setelah bertahun-tahun berada dalam konflik dengan jumlah sekitar 1,5 juta orang yang secara resmi terdaftar sebagai pengungsi internal, baik para pengungsi internal maupun penduduk lokal menghadapi banyak tantangan yang kompleks dan saling terkait. Masuknya IDP ke berbagai wilayah di seluruh Ukraina telah menjadi beban tekanan pada anggaran lokal serta pada infrastruktur

---

<sup>33</sup> Crisis Respon Plan IOM Ukraine, op.cit., 1 Januari-31 Desember 2018, halaman 2.

<sup>34</sup> IOM International, "Ukraine 2018: Humanitarian Compendium", <https://humanitariancompendium.iom.int/node/1226/appeals-print/>, (diakses pada 21 Desember 2018 pukul 22.15 WIB).

sosial lokal. Hal ini menyebabkan banyak masalah yang harus diatasi antara IDP dan penduduk lokal secara bersama-sama.<sup>35</sup>

Oleh karena itu, dengan masih tingginya kebutuhan pengungsi akan tempat tinggal dan lapangan pekerjaan, serta masyarakat lokal yang membutuhkan bantuan dengan rekonstruksi dan investasi dalam infrastruktur sosial, bantuan lebih lanjut sangat diperlukan baik dari lembaga internasional maupun pemerintah. Pengungsi dan masyarakat lokal membutuhkan bantuan untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Apa yang dibutuhkan adalah aksi cepat tanggap serta inisiatif hingga ke tingkat dasar yang menjangkau mereka yang membutuhkan bantuan dengan segera, misalnya melalui bantuan kemanusiaan langsung, bantuan hibah lebih lanjut, dan akses ke pinjaman mikro yang terjangkau untuk memulai kegiatan usaha.

---

<sup>35</sup> IOM Ukraina, "IDPs and Host Communities Need Comprehensive Support and Innovative Solutions to Cope with Recovery and Integration", 30 Juni 2016, <http://www.iom.org.ua/en/idps-and-host-communities-need-comprehensive-support-and-innovative-solutions-cope-recovery-and>, (diakses pada 8 Januari 2019 pukul 22.35 WIB).